

**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

**SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 24-P/PM III-18/AD/VI/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. AKBAR**
Pangkat/NRP : Sertu/21130146700493
Jabatan : Bamak Kompi Bantuan
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Janeponto, 15 April 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan Yonif Raider 733/Masariku Kota Ambon
Provinsi Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-20/C-03/VI/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/61/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

Menimbang : 1. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap berdasarkan fakta hukum bahwa Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas yang merupakan bukti dalam perkara ini ternyata dibuat dan ditandatangani tidak sesuai ketentuan Hukum Acara.

2. Bahwa oleh karena Berita Acara dan atau Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

3. Bahwa dasar pertimbangan Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan dan Tuntutan kepada Terdakwa ternyata diperoleh tidak sesuai dengan prosedur hukum maka terhadap Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut adalah cacat hukum.

4. Bahwa karena Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer cacat hukum maka terhadap Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.

5. Bahwa karena Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal.1 dari 2 hal. Putusan Nomor 24-P/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

